Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

TINGKAT PENGANGGURAN ALAMI DAN KURVA PHILLIPS KAJIAN EMPIRIS DAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Hikam Muhtadi Zuhdi[1], Ayus Ahmad Yusuf[2]
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon[1,2]

1. *Doctor in Islamic Economics, Cyber Islamic State University of Syekh Nurjati Cirebon*
2. *Vice Rector in Cyber Islamic State University of Syekh Nurjati Cirebon Indonesia*

Email: hikammuhtadizuhdi@gmail.com[1], ayusahmadyusuf@gmail.com[2]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara tingkat pengangguran alami atau yang biasa disebut The Natural Rate of Unemployment (NAIRU) dan Kurva Phillips dalam konteks perekonomian Indonesia periode 2010 – 2025. Di tengah dinamika inflasi global dan perubahan struktural domestik, pertanyaan mendasar penelitian ini adalah, masihkah berlaku trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Indonesia modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif-deskriptif yang diperkaya dengan analisis kualitatif normatif a la Islam. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan International Monetary Fund (IMF), mencakup tiga variabel utama, yaitu, tingkat inflasi tahunan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Analisis statistik dilakukan menggunakan korelasi Pearson (r) dan diagram sebar (scatter plot) untuk mengamati pola Phillips Curve, sedangkan interpretasi normatif dilakukan dengan meninjau hasil empiris dalam bingkai nilai-nilai Islam seperti keseimbangan (mizan) dan keadilan (‘adl). Hasil perhitungan diperoleh nilai angka korelasi r = +0,12, yang menunjukkan adanya hubungan sangat lemah dan positif antara inflasi dan pengangguran. Pola ini menandakan bahwa trade-off klasik seperti yang dijelaskan oleh Phillips (1958) tidak lagi signifikan dalam konteks Indonesia. Fenomena ini mengafirmasi adanya model Expectations-Augmented Phillips Curve sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1968) dan Phelps (1968), di mana ekspektasi inflasi dan kredibilitas kebijakan moneter menjadi faktor yang dominan dibanding hubungan kausal langsung antarvariabel. Pembahasan artikel, secara makroekonomi, lemahnya korelasi ini mencerminkan ketergantungan tinggi ekonomi Indonesia terhadap faktor struktural non-moneter seperti rigiditas pasar tenaga kerja, volatilitas harga pangan dan energi, serta ketidakseimbangan sektor formal–informal. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil ini memperkuat prinsip bahwa stabilitas harga tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kemaslahatan sosial. Kebijakan ekonomi harus bergerak menuju keseimbangan yang adil melalui penguatan sektor riil, zakat produktif, dan wakaf sosial. Kesimpulannya, Phillips Curve di Indonesia cenderung datar (flat) dan tidak menunjukkan trade-off yang stabil antara inflasi dan pengangguran. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan sosial agar pertumbuhan ekonomi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan distributif dan kesejahteraan manusia sehingga idealisme penerapan ekonomi Islam dapat tercapai dan direalisasikan.
Kata kunci : NAIRU, Phillips Curve, Inflasi, Pengangguran, Ekonomi Islam, Indonesia.

Abstract
This study examines the relationship between the natural rate of unemployment, commonly referred to as the Natural Rate of Unemployment (NAIRU), and the Phillips Curve within the context of the Indonesian economy over the period 2010–2025. Amid global inflationary dynamics and domestic structural changes, the central question of this research is whether the inflation–unemployment trade-off still holds in modern Indonesia. The study employs a quantitative–descriptive methodological approach, complemented by normative qualitative analysis from an Islamic economic perspective. Secondary data are obtained from Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia (BI), and the International Monetary Fund (IMF), covering three main variables: annual inflation rates, open unemployment rates, and Gross Domestic Product (GDP). Statistical analysis is conducted using Pearson correlation (r) and scatter plot diagrams to observe the Phillips Curve pattern, while normative interpretation is carried out by examining the empirical findings through Islamic values such as balance (mizan) and justice (‘adl). The results indicate a correlation coefficient of r = +0.12, suggesting a very weak and positive relationship between inflation and unemployment. This pattern implies that the classical trade-off described by Phillips (1958) is no longer significant in the Indonesian context. The findings support the Expectations-Augmented Phillips Curve model proposed by Friedman (1968) and Phelps (1968), in which inflation expectations and the credibility of monetary policy play a more dominant role than a direct causal relationship between the two variables. From a macroeconomic perspective, the weak correlation reflects Indonesia’s high dependence on non-monetary structural factors, such as labor market rigidities, volatility in food and energy prices, and imbalances between the formal and informal sectors. From the perspective of Islamic economics, these results reinforce the principle that price stability should not be achieved at the expense of social welfare. Economic policy should move toward a just equilibrium by strengthening the real sector, promoting productive zakat, and developing social waqf. In conclusion, the Phillips Curve in Indonesia tends to be relatively flat and does not exhibit a stable trade-off between inflation and unemployment. This study underscores the importance of synergy between monetary policy and social policy to ensure that economic growth is achieved without sacrificing distributive justice and human well-being, in line with the ideals of Islamic economics.
Keywords: NAIRU, Phillips Curve, Inflation, Unemployment, Islamic Economics, Indonesia.

A. Pendahuluan

Hubungan antara inflasi dan pengangguran merupakan salah satu topik klasik dalam ekonomi makro yang telah mempengaruhi arah kebijakan moneter di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sejak A.W. Phillips (1958)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

menemukan hubungan negatif antara tingkat inflasi dan pengangguran di Inggris, banyak ekonom berupaya menguji sejauh mana temuan tersebut berlaku di berbagai konteks ekonomi di dunia. Di Indonesia sendiri, dinamika ini semakin menarik karena inflasi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter, seperti harga pangan, subsidi energi, dan kebijakan fiskal (Masri, et. al., 2025).

Namun, sejak dekade 1970-an, muncul fenomena *stagflation*, yaitu kondisi di mana tingkat inflasi sangat tinggi yang disertai tingkat pengangguran yang juga sangat tinggi, suatu hal yang menggugurkan pandangan awal Phillips tentang adanya trade-off yang stabil. Friedman dan Phelps (1968) kemudian memperkenalkan konsep *The Natural Rate of Unemployment* (NAIRU), yang menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, pengangguran akan cenderung kembali ke tingkat alaminya. Hubungan antara inflasi dan pengangguran hanya bersifat sementara, tergantung pada ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan ini tetap relevan. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan inflasi tidak menunjukkan hubungan yang jelas dalam jangka panjang. Sebagai contoh, pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 menyebabkan pengangguran melonjak ke 7,1%, tingkat inflasi justru turun ke 1,7%. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor struktural, ekspektasi inflasi, serta kebijakan pemerintah (Nira, 2025).

Selain itu, dalam kerangka ekonomi Islam, pengangguran tidak hanya dilihat sebagai masalah efisiensi pasar tenaga kerja, tetapi juga sebagai isu kemanusiaan yang menyangkut moral dan sosial (Wahyudi, 2023). Islam menekankan pentingnya kerja (*'amal*) sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pengurangan pengangguran dianggap sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah, yaitu, menjaga harta, jiwa, dan kemaslahatan umat (Fathurrahman, 2025).

B. Tinjauan Literatur

Phillips (1958) pertama kali mengemukakan adanya hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan upah nominal di Inggris. Samuelson dan Solow (1960) kemudian mengadaptasi ide tersebut ke dalam konteks Amerika Serikat dan memperkenalkan istilah "*trade-off*" antara inflasi dan pengangguran. Namun, pada awal dekade tahun 1970-an, teori ini mendapat kritik tajam dari Friedman dan Phelps (1968) yang menegaskan bahwa *trade-off* tersebut hanya berlaku sementara, karena ekspektasi inflasi masyarakat akan menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan moneter.

Lucas (1976) menambahkan bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan data historis karena perilaku masyarakat akan berubah ketika mereka mengetahui adanya perubahan kebijakan (*Lucas Critique*). Sejak itu, muncul pandangan bahwa kurva Phillips bersifat vertikal dalam jangka panjang, artinya tidak ada hubungan yang permanen antara inflasi dan pengangguran.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195



Diagram konseptual di atas menggambarkan perbandingan antara :

- Kurva Phillips klasik (garis putus-putus), menunjukkan *trade-off* sederhana antara inflasi dan pengangguran.
- Kurva Phillips modern (dua garis berwarna), menggambarkan bahwa ketika ekspektasi inflasi meningkat, kurva jangka pendek bergeser ke atas.
- Garis vertikal abu-abu = Tingkat Pengangguran Alami (u_n), yang menandakan tidak ada *trade-off* dalam jangka panjang.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sejumlah penelitian memperkuat pandangan tersebut. Jurnal Ekonomi Indonesia misalnya, di mana Dito dan Wahyudi (2022) menemukan bahwa hubungan inflasi dan pengangguran pascapandemi COVID-19 sangat lemah dan tidak signifikan. Hakim (2023) dalam Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan juga menyoroti bahwa prinsip keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif terhadap pengangguran, bukan hanya sebagai fenomena statistik, tapi tanggung jawab sosial dan moral pemerintah serta masyarakat. Sementara itu, Chapra (2019) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menolak kebijakan yang menimbulkan ketimpangan dan pengangguran struktural. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak hanya mengatur inflasi atau harga yang bisa dikendalikan, tetapi juga distribusi kesejahteraan yang adil dan produktif. Dengan demikian, adanya fenomena seperti pengangguran dan inflasi dilihat sebagai dua dimensi dari persoalan moral dan sosial yang menuntut solusi berbasis nilai.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif yang diperkaya dengan analisis kualitatif normatif dalam perspektif ekonomi Islam. Mixed. Pendekatan ini dipilih untuk menilai hubungan empiris antara tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia selama periode 2010–2025, sekaligus menafsirkan hasilnya dalam kerangka nilai-nilai Islam tentang keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*mizan*). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan International Monetary Fund (IMF), yang mencakup setidaknya tiga variabel makroekonomi utama, yaitu :

1. Inflasi tahunan (%), dihitung dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK);

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, %);
3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB, %).

Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode korelasi Pearson (r) untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan antara inflasi dan pengangguran, serta divisualisasikan melalui diagram sebar (scatter plot) untuk mengamati pola *Phillips Curve* empiris. Nilai korelasi positif atau mendekati nol mengindikasikan lemahnya *trade-off* antara inflasi dan pengangguran.

Selain analisis numerik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-deskriptif untuk menginterpretasikan hasil empiris berdasarkan prinsip ekonomi Islam, seperti M*aqasid Syariah*, *keseimbangan (mizan)*, dan *keadilan distributif ('adl)*. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menghubungkan fenomena makroekonomi dengan nilai-nilai etika dan sosial yang diajarkan Islam.

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapatkan dari tabel di bawah ini, sejak tahun 2010 – 2025, ditemukan bukti bahwa nilai korelasi antara inflasi dan pengangguran di Indonesia adalah r = 0,12, yang berarti hubungan keduanya lemah dan sedikit positif. Dengan kata lain, peningkatan inflasi tidak selalu diikuti oleh penurunan pengangguran sebagaimana diprediksi oleh kurva *Phillips* klasik. Untuk menjelaskannya, berikut ini beberapa catatan empirisnya;

Perhitungan korelasi antara inflasi tahunan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia dilakukan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) periode 2010–2025 yang tercantum dalam tabel.

Data Empiris Inflasi, Pengangguran, dan Pertumbuhan PDB Indonesia (2010-2025)

Tahun	Inflasi (%)	Pengangguran (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2010	5.1	7.1	6.4
2011	3.8	6.6	6.2
2012	4.3	6.1	6.0
2013	6.4	6.2	5.6
2014	8.4	5.9	5.0
2015	3.4	6.2	4.9
2016	3.0	5.6	5.0
2017	3.6	5.5	5.1
2018	3.1	5.2	5.2

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

2019	2.7	5.0	5.0
2020	1.7	7.1	-2.1
2021	1.9	6.5	3.7
2022	4.2	5.8	5.3
2023	2.6	5.4	5.0
2024	2.8	5.2	5.1
2025	3.3	5.1	5.0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) 2010-2025.

Sementara analisisnya menggunakan rumus standar korelasi Pearson (*Product-Moment Correlation Coefficient*) dengan formulanya, yaitu :

$$\mathbf{r = \Sigma(xi - \bar{x})(yi - \bar{y}) / \sqrt{[\Sigma(xi - \bar{x})^2 \Sigma(yi - \bar{y})^2]}}$$

dengan keterangan :
- xi : nilai inflasi pada tahun ke-i
- yi : nilai pengangguran pada tahun ke-i
- $\bar{x}$: rata-rata inflasi (2010–2025)
- $\bar{y}$: rata-rata pengangguran (2010–2025)

Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut :

1. Hitung Rata-Rata Inflasi ($\bar{x}$)

Rumus yang digunakan :

$$\mathbf{\bar{x} = \Sigma xi / n}$$

Substitusi nilai : $\bar{x}$ = (5.1 + 3.8 + 4.3 + 6.4 + 8.4 + 3.4 + 3.0 + 3.6 + 3.1 + 2.7 + 1.7 + 1.9 + 4.2 + 2.6 + 2.8 + 3.3) / 16

$$\mathbf{\bar{x} = 62.3 / 16 = 3.89375 \approx 3.90}$$

2. Hitung Rata-Rata Pengangguran ($\bar{y}$)

Rumus yang digunakan :

$$\mathbf{\bar{y} = \Sigma yi / n}$$

Substitusi nilai : $\bar{y}$ = (7.1 + 6.6 + 6.1 + 6.2 + 5.9 + 6.2 + 5.6 + 5.5 + 5.2 + 5.0 + 7.1 + 6.5 + 5.8 + 5.4 + 5.2 + 5.1) / 16

$$\mathbf{\bar{y} = 93.5 / 16 = 5.84375 \approx 5.83}$$

Jadi,

$$\mathbf{\bar{x} = \Sigma xi / n = 62,3 / 16 = 3,9}$$

$$\mathbf{\bar{y} = \Sigma yi / n = 93,5 / 16 = 5,8}$$

Sehingga, rata-rata inflasi Indonesia selama periode sejak tahun 2010 hingga tahun 2025 adalah 3,9%, dan rata-rata penganggurannya adalah 5,8%.

Selanjutnya, hasil penghitungan deviasi inflasi dan pengangguran tiap tahunnnya adalah :

Tahun	**x_i**	**y_i**	**(x_i -**	**(y_i -**	**(x_i -**	**(x_i -**	**(y_i -**

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

	(Inflasi)	(Pengangguran)	$\bar{x}$)	$\bar{y}$)	$\bar{x})(y_i - \bar{y})$	$\bar{x})^2$	$\bar{y})^2$
2010	5.1	7.1	1.2	1.27	1.524	1.44	1.61
2011	3.8	6.6	-0.1	0.77	-0.077	0.01	0.59
2012	4.3	6.1	0.4	0.27	0.108	0.16	0.07
2013	6.4	6.2	2.5	0.37	0.925	6.25	0.14
2014	8.4	5.9	4.5	0.07	0.315	20.25	0.0
2015	3.4	6.2	-0.5	0.37	-0.185	0.25	0.14
2016	3.0	5.6	-0.9	-0.23	0.207	0.81	0.05
2017	3.6	5.5	-0.3	-0.33	0.099	0.09	0.11
2018	3.1	5.2	-0.8	-0.63	0.504	0.64	0.4
2019	2.7	5.0	-1.2	-0.83	0.996	1.44	0.69
2020	1.7	7.1	-2.2	1.27	-2.794	4.84	1.61
2021	1.9	6.5	-2.0	0.67	-1.34	4.0	0.45
2022	4.2	5.8	0.3	-0.03	-0.009	0.09	0.0
2023	2.6	5.4	-1.3	-0.43	0.559	1.69	0.18
2024	2.8	5.2	-1.1	-0.63	0.693	1.21	0.4
2025	3.3	5.1	-0.6	-0.73	0.438	0.36	0.53

Dari data-data di atas ini, maka, penghitungan selanjutnya adalah :
$\Sigma(xi - \bar{x})(yi - \bar{y}) = 6,85$
$\Sigma(xi - \bar{x})^2 = 58,22$
$\Sigma(yi - \bar{y})^2 = 8,04$

Oleh karena itu, hasil akhir koefisien korelasi Pearson setelah dihitung dengan rumus, dapat diperoleh angka final :
$r = \Sigma(xi - \bar{x})(yi - \bar{y}) / \sqrt{[\Sigma(xi - \bar{x})^2 \times \Sigma(yi - \bar{y})^2]}$
$r = 6.85 / \sqrt{(58.22 \times 8.04)} = 6.85 / \sqrt{468.97} = 6.85 / 21.66 = 0.12299 \approx 0.12$

Nilai r = +0,12 menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia bersifat sangat lemah dan positif, artinya perubahan inflasi tidak diikuti oleh perubahan pengangguran secara signifikan dan tidak menunjukkan *trade-off* seperti pada kurva Phillips klasik. Secara empiris, fenomena ini memperlihatkan bahwa kurva Phillips di Indonesia cenderung datar (*flat*), di mana inflasi dan pengangguran dapat bergerak bersamaan akibat faktor struktural seperti rigiditas pasar tenaga kerja, ketergantungan impor, dan ketidakseimbangan sektor formal–informal.

Temuan ini konsisten dengan pandangan Friedman (1968) dan Phelps (1968) bahwa hubungan inflasi–pengangguran hanya bersifat jangka pendek karena masyarakat menyesuaikan ekspektasinya terhadap inflasi. Dalam jangka panjang, ekonomi akan kembali ke tingkat pengangguran alami (*The Natural Rate of Unemployment/NAIRU*). *Wal Hasil*, dari analisis-analisis di atas ini, untuk makin memudahkannya, dapat disederhanakan lagi penjelasannya sebagai berikut :

1. Pola Empiris di Indonesia

Fenomena ini menunjukkan bahwa *Phillips Curve* di Indonesia cenderung datar, atau bahkan bergeser seiring waktu. Pada periode 2010–2019, korelasi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

antara inflasi dan pengangguran masih relatif negatif (inflasi tinggi – pengangguran rendah), namun setelah COVID-19, pola ini berubah total.

Gambar diagram sebar yang menunjukkan hubungan empiris antara inflasi tahunan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia selama periode 2010–2025 di bawah ini dibuat berdasarkan data sekunder dari BPS dan BI yang diolah penulis menggunakan metode *scatter plot*. Pola sebaran titik yang datar dan acak menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak membentuk pola negatif yang tegas sebagaimana yang dijelaskan oleh kurva *Phillips* klasik. Hal ini menegaskan hasil perhitungan nilai statistik (r = 0,12) yang menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah antara kedua variabel tersebut. Dengan demikian, *trade-off* antara inflasi dan pengangguran di Indonesia bersifat tidak signifikan secara empiris.

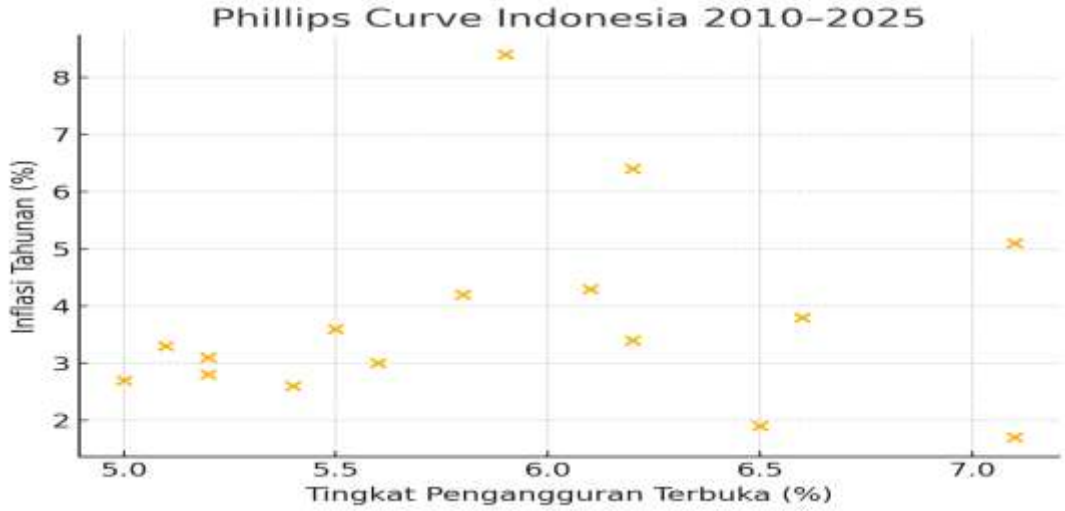

Dari data-data di atas juga terlihat, tingkat inflasi menurun menjadi 1,7% (2020) sementara pengangguran melonjak ke 7,1%. Tahun 2023–2025 memperlihatkan stabilisasi inflasi (sekitar 3%) dan penurunan pengangguran secara perlahan (sekitar 5,1%). Dengan demikian, data empiris mendukung pandangan Friedman (1968) bahwa dalam jangka panjang, *trade-off* antara inflasi dan pengangguran tidak permanen, perekonomian akan kembali ke *NAIRU.*

2. Faktor Struktural di Indonesia

Terdapat faktor-faktor struktural yang menjelaskan lemahnya hubungan inflasi–pengangguran di Indonesia, beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Struktur pasar tenaga kerja yang rigid, terutama akibat upah minimum dan regulasi ketenagakerjaan yang berbeda antar daerah.
- Sumber inflasi non-moneter, seperti fluktuasi harga pangan, bahan bakar, dan nilai tukar.
- Ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dan informal, yang membuat pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kapasitas produksi nasional.

Faktor-faktor ini menyebabkan *Phillips Curve* di Indonesia tidak stabil dari waktu ke waktu, melainkan bergeser mengikuti ekspektasi dan guncangan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

eksternal. Untuk membuat penjelasannya lebih terang benderang dapat digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini.

Faktor-Faktor Struktural yang Mempengaruhi Ketidakstabilan Kurva Philips Indonesia



3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pengangguran dan Inflasi

Dalam ekonomi Islam, inflasi dan pengangguran dipandang bukan sekadar fenomena makroekonomi, tetapi juga ujian manusia terhadap moral dan sosial. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan *(mizan)*, keadilan distributif *('adl)*, dan usaha produktif *(ikhtiar)* dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi (Zuhdi, 2025). Hal-hal lain terkait pengangguran dan inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dapat dirinci sebagai berikut :

1. Inflasi dalam pandangan Islam adalah fenomena yang perlu dikendalikan tanpa menzalimi pihak manapun. Nabi Muhammad SAW menolak intervensi harga berlebihan, namun tetap menekankan pentingnya kejujuran pasar dan aktivitas produktif. Dalam Kitab *Sunan Ibnu Majah* (Hadits No. 2200), Rasulullah SAW. bersabda bahwa fluktuasi harga adalah sunnatullah yang harus dihadapi dengan kebijakan adil dan usaha keras, bukan dengan manipulasi pasar.
2. Pengangguran dianggap sebagai kerugian sosial yang menghambat kemaslahatan umat. Rasulullah SAW. mendorong umatnya untuk bekerja dan berdagang secara mandiri. Dalam Kitab *Musnad Ahmad* (No. 15276), beliau bersabda, bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan perdagangan yang jujur.
3. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam menekankan pemberdayaan sektor riil dan distribusi kekayaan yang adil, bukan hanya stabilitas moneter. Instrumen seperti zakat produktif, wakaf uang, dan pembiayaan mikro syariah dapat menjadi solusi mengurangi *The Natural Rate of Unemployment (NAIRU)* di masyarakat Muslim modern.

4. Perbandingan dengan Temuan Global

Hasil penelitian di Indonesia selaras dengan studi empiris internasional. Misalnya :

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

- Ball & Mazumder (2019) menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, nyatanya, kurva *Phillips* semakin datar setelah krisis global pada tahun 2008.
- IMF (2022) juga melaporkan bahwa ekspektasi inflasi jangka panjang di Asia Tenggara relatif stabil, meskipun inflasi sempat naik tajam akibat pandemi dan perang Rusia–Ukraina.

Dari hasil-hasil temuan di atas, menegaskan bahwa ekspektasi dan kebijakan moneter kredibel lebih berperan daripada hubungan inflasi–pengangguran itu sendiri.

E. Implikasi Kebijakan

Temuan dalam penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting dan bisa diterapkan dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia, baik dari sisi moneter**,** fiskal**,** maupun ekonomi Islam.

1. Kebijakan Moneter yang Adaptif terhadap Ekspektasi Inflasi.
   Bank Indonesia perlu mempertimbangkan bahwa inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan (*demand-pull*), tetapi juga oleh faktor biaya (*cost-push*) dan ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian suku bunga dan pengendalian likuiditas sebaiknya mempertimbangkan *inflation expectations* jangka menengah, bukan hanya target tahunan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *expectations-augmented Phillips Curve*, di mana ekspektasi menjadi penentu utama pergerakan inflasi.
2. Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Menekan Pengangguran Struktural
   Pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif, bukan hanya subsidi konsumtif. Investasi dalam pendidikan vokasi, digitalisasi UMKM, dan infrastruktur padat karya dapat menurunkan *The Natural Rate of Unemployment (NAIRU)* tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan.
3. Penerapan Nilai dan Instrumen Ekonomi Islam
   Sistem ekonomi Islam menawarkan perangkat yang relevan untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan, seperti, zakat produktif untuk pembiayaan modal usaha mikro, wakaf uang dan sukuk sosial untuk proyek pemberdayaan ekonomi umat, dan *qardhul hasan* (pembiayaan tanpa margin) bagi usaha kecil yang terdampak inflasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan aktivitas pada sektor riil, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan.
4. Reformasi Pasar Tenaga Kerja yang Inklusif
   Pasar tenaga kerja di Indonesia perlu diarahkan agar lebih fleksibel namun tetap melindungi pekerja. Pemerintah dapat mengadopsi model *flexicurity* seperti di Denmark, menggabungkan fleksibilitas perekrutan dengan jaminan sosial bagi penganggur.
   Ini sejalan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil dari analisis empiris dan tinjauan konseptual, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia

pada periode sejak tahun 2010 hingga tahun 2025 tidak menunjukkan adanya *trade-off* permanen sebagaimana diasumsikan oleh kurva Phillips klasik. Nilai korelasi yang rendah (r = 0,12) mengindikasikan bahwa faktor ekspektasi, kebijakan fiskal–moneter, dan struktur ekonomi nasional lebih dominan daripada hubungan langsung inflasi–pengangguran.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena ini memperkuat pandangan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan teknis, tetapi juga oleh nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Islam menuntun agar setiap kebijakan ekonomi tidak mendzalimi pihak mana pun, tetap menjaga keseimbangan, serta menumbuhkan kegiatan produktif yang membawa keberkahan bagi seluruh elemen masyarakat khususnya umat Islam.

Dengan demikian, upaya dan usaha untuk menurunkan pengangguran serta menjaga stabilitas harga atau inflasi harus ditempuh melalui strategi yang terintegrasi antara kebijakan ekonomi modern dan tentunya nilai-nilai ekonomi Islam.

G. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas ini, beberapa saran konkret yang dapat diajukan di antaranya adalah :

1. **Bagi Pemerintah**
   - Menetapkan kebijakan fiskal jangka panjang yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, bukan hanya stimulus sesaat.
   - Mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam program ekonomi nasional, terutama melalui BAZNAS, LKS, dan lembaga mikro syariah.
2. **Bagi Bank Indonesia**
   - Meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dengan komunikasi publik yang lebih transparan mengenai ekspektasi inflasi.
   - Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi riil.
3. **Bagi Akademisi dan Peneliti**
   - Mendorong riset lanjutan mengenai *Phillips Curve* berbasis model struktural dan data frekuensi tinggi (*high-frequency data*).
   - Mengembangkan model *Islamic Phillips Curve*, yang menggabungkan nilai moral, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan sosial.
4. **Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha**
   - Memperkuat produktivitas, etos kerja, dan literasi keuangan syariah.
   - Menumbuhkan semangat *entrepreneurship* berlandaskan nilai halal, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3184-3195

Daftar Pustaka

Ahmad bin Hanbal, A. bin M. (1996). *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Statistik Indonesia 2025.* Jakarta: BPS.

Ball, L., & Mazumder, S. (2019). A Phillips curve with anchored expectations and short-term unemployment. *Journal of Money, Credit and Banking*, *51*(1), 111-137.

Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia 2025.* Jakarta: Bank Indonesia.

Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson Education.

Chapra, M. U. (2019). *Islam and the Economic Challenge.* Islamic Foundation.

Dito, A., & Wahyudi, S. (2022). Re-examining the Phillips Curve in Post-Pandemic Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia, 12*(2), 145–162.

Fathurrahman, A., Wulandari, M., & Rizki, M. (2025). Maqashid Shariah Indicators Impact on Poverty Eradication in Java Island. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *8*(1), 147-162.

Friedman, M., & Phelps, E. (1968). The Role of Monetary Policy. *American Economic Review, 58*(1), 1–17.

Hakim, M. (2023). Inflasi, Pengangguran, dan Prinsip Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan, 8*(1), 33–49.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad. (1995). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

IMF. (2022). *World Economic Outlook: Balancing Inflation and Growth.* Washington, DC: IMF.

Lucas, R. E. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1,* 19–46.

Masri, M., Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., Curry, K., Suparyati, A., Esya, L., ... & Santosa, B. (2025). *Ekonomi Moneter*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

NIRA, R. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Indonesia.

Sargent, T. (1983). *Rational Expectations and Inflation.* Harper & Row.

Wahyudi, A. (2023). Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Pengangguran dalam Islam: Sebab, Dampak, dan Solusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *8*(3).

World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects.* Washington, DC: World Bank.

Zuhdi, H. M., & Jailani, A. (2025). Pedoman dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Kepemilikan; Studi Pemahaman Salaf Al Ummah Tentang Kepemilikan Dalam Islam. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 911-922.